

Analisis Kesulitan Perdamaian Israel dan Palestina Akibat Hak Veto Amerika Serikat

Asnimar Duha¹, Edoy Nainggolan², Erlina Teresia Sihombing³, Nindy Asyifa⁴,
Yolanda Sembiring⁵

Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Medan
erlinatrsiashb@gmail.com

Abstract

The United Nations (UN) basically has to create world peace. So in the midst of the war between Israel and Palestine, the UN must present a UN security council, resolve and reconcile the two countries. However, large countries, namely the United States, use their veto rights to thwart a decision to prioritize their country's interests, so that peace cannot be achieved through the UN Security Council. In analyzing this problem, the author uses the literature study method by collecting the results of previous research to answer the problems in this writing. The research results stated that the United States used its veto power on 30 (thirty) occasions against Israel. The United States has always supported Israel because there is a mutualistic relationship between the two countries.

Keywords: United Nations, war, peace, veto rights, mutualism relations

Abstrak

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada dasarnya harus menciptakan perdamaian dunia. Maka di tengah perang antara Israel dan Palestina maka PBB harus menghadirkan dewan keamanan PBB, menyelesaikan, dan mendamaikan kedua negara tersebut. Namun negara great powers yaitu negara Amerika Serikat menggunakan hak veto-nya untuk menggagalkan sebuah keputusan untuk mengedepankan kepentingan negaranya, sehingga perdamaian tidak dapat tercapai melalui Dewan Keamanan PBB. Dalam menganalisis permasalahan ini, maka penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan hasil penelitian sebelumnya untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa Amerika Serikat menggunakan hak veto sebanyak 30 (tiga puluh) kesempatan untuk Israel. Amerika Serikat selalu mendukung Israel karena ada hubungan mutualisme antar kedua negara tersebut.

Kata kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa, perang, perdamaian, hak veto, hubungan mutualisme

A. Pendahuluan

Berakhirnya perang dingin serta perang teluk II menjadikan Amerika Serikat sebagai negara superpower baru di dunia dan satu-satunya yang memiliki pengaruh yang besar dalam percaturan politik internasional. Dengan kekuasaan politik yang besar, Amerika Serikat berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan untuk membangun negara Amerika menjadi lebih maju. Salah satu agenda Amerika untuk membangun negara Amerika adalah dengan mengamankan suplai minyak dari Timur Tengah. Akan tetapi ternyata hal itu terkendala dengan kenyataan bahwa Timur Tengah sedang kacau karena adanya konflik yang berkepanjangan di kawasan tersebut, untuk memenuhi kebutuhan Amerika akan minyak, Amerika harus segera membuat

keadaan damai di Timur Tengah. Amerika beranggapan bahwa perdamaian di wilayah Timur Tengah hanya akan tercapai jika konflik antara Israel dan Palestina dapat diselesaikan. Oleh karena hal tersebut Amerika Serikat melibatkan diri dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Selain itu Amerika Serikat juga memiliki agenda nasional yang harus dilaksanakan, dalam bab ini akan dibahas bagaimana upaya Amerika Serikat untuk mendamaikan Israel dan Palestina.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada masa periode jabatannya (2017–2021) telah meresmikan rencana perdamaian Israel-Palestina yang disebut dengan *Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestine and Israeli People* (Damai untuk Kemakmuran: Visi untuk Meningkatkan Kehidupan Rakyat Palestina dan Israel). Usulan Donald Trump tersebut diluncurkan pada hari Selasa 28 Januari 2020 di Gedung Putih yang dihadiri oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.¹ Rencana perdamaian yang diusulkan pada masa kepemimpinan Donald Trump tersebut merupakan upaya kesekian kalinya yang dilakukan Amerika untuk ikut andil dalam menyelesaikan konflik antara Israel dengan Palestina. Rencana tersebut sebelumnya telah ditunda selama 2 (dua) tahun.

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu masalah sentral dan krusial di kawasan Timur Tengah. Konflik dan resolusi konflik pun menjadi salah satu isu yang tetap saja menonjol dalam perkembangan studi politik di dunia hampir sepanjang abad 20 bahkan sampai abad 21 saat ini, terutama masalah pertikaian Arab – Israel. Sejumlah pihak dan ahli bahkan mulai menuding apa yang kini tengah dilakukan Israel terhadap warga Palestina adalah sebuah upaya genosida. Holocaust terjadi di antara tahun 1933 dan 1945 dan beruntut hingga kini. Meskipun sudah terjadi sejak awal mula peradaban manusia, upaya internasional atas pencegahan dan pengadilan terhadap genosida baru terjadi se usai Perang Dunia II. Sejarah pengadilan itu dilatarbelakangi peristiwa genosida paling mengerikan yang pernah disaksikan dunia, yakni Holocaust yang dilakukan Nazi Jerman. Genosida itu diprakarsai oleh Adolf Hitler dan menyasar bangsa Yahudi, Slav, Roma, dan Gypsi. Sejak berkuasanya Partai Nazi pada 1933 hingga berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, diperkirakan 6 juta orang atau dua pertiga dari populasi bangsa Yahudi di Eropa dibunuh dalam genosida itu.

Sejarah mencatat awal mula konflik terbuka perang Arab–Israel dimulai sejak tahun 1948. Dimana negara-negara Arab yang bersatu melawan Israel. Namun Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang merupakan salah satu organisasi internasional dengan tujuan memelihara perdamaian dan keamanan Dunia, saat itu tidak mengeluarkan Keputusan atau mengirim pasukan keamanan guna menghentikan serangan tersebut. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan resolusi dari anggota lain dewan keamanan. Berdasarkan pasal 27 UN Charter, suatu keputusan yang akan diputuskan harus berdasarkan kelima anggota tetap tersebut. Sehingga apabila salah satu negara great powers menggunakan hak veto-nya untuk menggagalkan sebuah keputusan untuk mengedepankan kepentingan negaranya, maka perdamaian tidak dapat tercapai

melalui Dewan Keamanan PBB. Jika Amerika tidak mengecewakan hak veto pada 1948, maka perdamaian itu sudah tercapai.

Apa itu sebenarnya hak veto?, Hak veto adalah hak untuk membatalkan rancangan resolusi yang sudah diputuskan dari suara terbanyak hasil voting negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Penggunaan sistem veto sejak awal pembentukannya memang digunakan untuk melindungi kepentingan para pendiri PBB, dimana hal tersebut hanya diperuntukan bagi negara-negara yang memenangkan Perang Dunia II (A. Mohammed, 2003). Pada saat pendiriannya di tahun 1948, telah ditentukan bahwa perwakilan dari Inggris, China, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Perancis akan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan yang kemudian hak veto tersebut melekat padanya berdasarkan Pasal 27 Piagam PBB. Hak veto muncul pada saat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal menyepakati resolusi terkait perang Israel dan Hamas pada Rabu (25/10/2023). Dikutip dari DW, Rusia dan China sepakat memveto atau membatalkan draf resolusi dari Amerika Serikat (AS). Draft resolusi AS untuk konflik di Gaza-Israel yaitu mengutuk Hamas, menyerukan pembebasan sandera di Gaza, dan memungkinkan 'jeda kemanusiaan' di konflik untuk bantu warga sipil. Dikutip dari WSJ, Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia mengatakan bahwa tindakan AS ini tidak mengamanatkan gencatan senjata dan tidak memengaruhi operasi darat Israel di Gaza. (Trisna Wulandari, 2023).

B. Metode Penelitian

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Metode studi pustaka melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Ini mencakup buku, artikel jurnal, laporan, dan sumber-sumber tepercaya lainnya. Metode studi pustaka dalam konteks "Kesulitan Perdamaian Israel dan Palestina Akibat Hak Veto Amerika Serikat" melibatkan pencarian dan analisis literatur terkait, termasuk buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber akademis. Fokus pada pemahaman dampak hak veto Amerika Serikat terhadap upaya perdamaian antara Israel dan Palestina, dengan mencari pandangan berbagai ahli dan peneliti untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Metode ini juga berguna untuk memperdalam kajian teroris atau mempertajam metodologis tanpa peneliti terjun ke lapangan.

C. Hasil Dan Pembahasan

Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini adalah saat Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill, dan Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt, mengadakan pembicaraan khusus yang menghasilkan deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian dunia (Fadillah, dkk 2018). Ini menjadi catatan bahwa PBB pada kodratnya menciptakan perdamaian dunia. Amerika Serikat sebagai satu dari dua negara yang membentuk PBB harus

menciptakan perdamaian ditengah perang antara negara Israel dengan negara Palestina.

Negara Israel sendiri berdiri pada 14 Mei 1948. Israel bisa berdiri karena Inggris memberikan sebagian tanah Palestina ke Israel selepas perang dunia pertama. Keputusan ini tidak hanya ditentang rakyat Palestina, tetapi juga hampir seluruh negara-negara Arab. Hal ini diwarnai dengan penyerangan pasukan sekutu Arab yang terdiri dari Suriah, Mesir, Jordan, Lebanon dan Irak ke negara Israel sehari kemudian, pada 15 Mei 1948. Sehingga terjadilah perang Arab-Israel pertama (Rudi Candra, 2018). Berdirinya negara Israel membuat wilayah Palestina khususnya Jalur Gaza terus bergolak. Wilayah Gaza dengan luas 365 kilometer persegi ini seolah menjadi penjara besar bagi sendiri yang tinggal di wilayah Gaza dengan populasi sekitar 1,7 juta bangsa. Mengapa menjadi penjara bagi warga Palestina sendiri? Karena posisi pada peta menunjukkan bahwa mereka terisolasi jauh dari wilayah kesatuan Palestina. Warga yang tinggal di Gaza merasa dikurung oleh wilayah Israel. Serangan Israel terhadap Gaza yang dimulai pada bulan Juli hingga Agustus 2014 yang menyita perhatian masyarakat internasional. Kejadian tersebut merupakan salah satu serangan terbesar Israel terhadap Gaza sejak berdirinya negara Israel.



Keterangan : Negara Israel ditandai dengan warna kuning, sedangkan Palestina ditandai dengan warna orans kecoklatan

Dewan Keamanan didalam PBB terdiri dari 15 anggota, 5 anggota diantaranya merupakan anggota tetap. Lima negara tersebut adalah China, Perancis, Uni Soviet (sekarang Rusia), Inggris, dan Amerika Serikat. Sedangkan kesepuluh anggota lain yang tidak tetap dipilih untuk masa jabatan dua tahun melalui Majelis Umum. Kelima anggota tetap ini memiliki status luar biasa (eksepsional) tidak hanya atas kepermanenannya, tetapi juga kekuatan 'hak veto' salah satunya adalah Amerika Serikat. Hak veto pada dasarnya adalah hak untuk membatalkan keputusan,

ketetapan, rancangan resolusi dari anggota lain dewan keamanan (Hardianti, dkk 2015).

Perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan melalui dua cara. Pertama melalui kekuatan senjata seperti yang dilakukan kelompok Hamas di bawah komando Perdana Menteri Palestina Ismail Haniya. Kedua melalui proses diplomasi seperti yang dilakukan kelompok Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas. Israel sendiri tanggal 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009 Israel melakukan serangan ke jalur Gaza, untuk melumpuhkan kekuatan Hamas. Sehingga Mahmoud Abbas mengajukan proposal menjadi anggota penuh organisasi bangsa-bangsa (PBB). Namun, keinginan tersebut akhirnya ditentang keras oleh pemerintah Amerika Serikat. Alasan Amerika karena ditakutkan permasalahan Palestina bisa mengganggu stabilitas di dalam organisasi PBB, dan lebih yakin pendirian negara Palestina hanya bisa dilakukan dengan pembicaraan khusus dengan pemerintah Israel dan tidak membawa permasalahan ini ke PBB (Rudi Candra, 2018)

Amerika Serikat cukup sering menggunakan hak veto-nya, khususnya mengenai invansi Israel di Palestina. Penggunaan hak veto sejak 1945 sampai 2014, sebanyak 77 kali Amerika Serikat menggunakannya untuk mementingkan kepentingan negaranya, maupun aliansinya, salah satunya Israel. Dari 77 kali veto yang pernah digunakan, sebanyak 30 kali digunakan untuk melindungi Israel dari draft resolusi yang bertujuan untuk mengakhiri okupasi Israel di Palestina (Hardianti, dkk 2015).

Jika ditarik mundur ke belakang, terdapat keterkaitan mengapa kasus Israel dan Gaza tak kunjung usai. Salah satu agenda pembahasan Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza yang diluncurkan pada 11 November 2006 dengan draft resolusi nomor S/2006/878 tidak tercapai. draft tersebut di-submit oleh Qatar yang diantaranya berisi :

1. Mengajak Israel, kekuasaan yang mendukungnya, untuk segera menghentikan operasi militernya yang membahayakan penduduk sipil Palestina di Pendudukan Wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan untuk segera menarik pasukannya dari Jalur Gaza dalam posisi sebelum 28 Juni 2006
2. Meminta Sekretaris Jenderal untuk membentuk misi pencari fakta
3. Mengajak Israel, kekuasaan yang mendukungnya, untuk teliti mematuhi kewajiban dan tanggung jawab di bawah Konvensi Jenewa relatif terhadap Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang 12 Agustus 1949
4. Menekankan kebutuhan untuk melestarikan institusi, infrastruktur dan properti Palestina;
5. Mengungkapkan keprihatinan tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan dari rakyat Palestina dan menyerukan pemberian bantuan darurat kepada mereka.

Draft resolusi tersebut dibentuk dengan harapan serangan roket Israel di Gaza dapat dihentikan dan Israel menarik pasukannya di Jalur Gaza, termasuk okupasi di Jerussalem, karena melanggar beberapa aturan dalam Hukum Internasional. Namun perwakilan Amerika, Bolton, saat itu menyampaikan bahwa draft Resolusi tersebut

tidak menampilkan karakterisasi dari peristiwa terakhir di Gaza. Amerika Serikat juga tidak memajukan perdamaian Israel-Palestina yang di inginkan dan yang mereka telah kerjakan dengan penuh kesungguhan. Berikut merupakan beberapa alasan Amerika menyanggah draft tersebut:

1. Amerika berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam draft berat sebelah terhadap Israel dan bermotif politik
2. Dalam hal pembentukan tim pencari fakta, hal tersebut tidak perlu dilakukan karena tidak penting dan tidak akan mengubah kondisi lapangan.

Akibat banyaknya hak veto dari Amerika Serikat terhadap negara Israel maka hukum setiap resolusi yang di veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB berakhir menjadi draft saja (Hardianti, dkk 2015).

Saat ini terjadi konflik antara Israel dengan Palestina sejak 7 Oktober 2023. Berdasarkan laporan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA), ada 16.673 penduduk Palestina dan Israel yang tewas sepanjang tahun berjalan hingga 28 November 2023. Jumlah korban tersebut melonjak drastis semenjak agresi Israel yang dipicu serangan roket Hamas pada 7 Oktober 2023. PBB yang seharusnya memberikan perdamaian bagi dunia, namun kini Dewan Keamanan PBB salah satunya Amerika Serikat tidak pernah memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian konflik kedua negara tersebut. Padahal kejahatan perang telah jelas dilakukan oleh Israel yang menggunakan bom fosfor kepada warga Palestina (Putra, dkk 2023).

Lalu apa sebenarnya yang melatarbelakangi Amerika Serikat selalu melindungi negara Israel dengan hak veto itu? (Rudi Candra, 2018) mengatakan bahwa terdapat politik mutualisme antara Israel dengan Amerika. Ada dua kepentingan yang dikejar oleh Amerika Serikat atas hubungan ini yaitu aspek ekonomi, dan aspek politik.

1. Aspek ekonomi.
 - a. Negara Amerika Serikat ingin menguasai wilayah-wilayah di Timur Tengah. Mengingat wilayah Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Serta posisinya berada pada persimpangan tiga benua yaitu Asia, Afrika, dan Eropa (Riza Sihbudi, 2007). Adapun wilayah yang berada di Timur Tengah seperti Turki, Israel, Palestina, dan negara lain yang dapat dilihat pada peta dibawah ini. Amerika Serikat sangat butuh dengan minyak bumi mengingat infrastruktur ekonomi industri dalam negeri AS masih sangat tergantung dari minyak bumi. Israel diperdayakan oleh Amerika Serikat sebagai “bocah nakal” untuk memecah-belah wilayah lain yang ada di Kawasan Timur Tengah. Sebagai contoh akibat perang dari Israel terhadap Gaza di tahun 2009 negara-negara Arab berusaha memberikan bantuan, tetapi keputusan pemerintah Mesir di bawah pimpinan Husni Mubarak untuk menutup pintu Ra’ffah, sebagai pintu masuk satu-satunya ke jalur Gaza.
 - b. Negara Israel sangat beruntung akibat hubungan politik mutualisme yaitu bahwa sampai akhir tahun 1991, pemerintah Amerika Serikat telah

memberikan pada Israel 53 milyar dolar Amerika dalam bentuk bantuan dan keuntungan-keuntungan Istimewa.

2. Aspek politik.

- a. Negara AS meraih dukungan suara dan jabatan politik. Dukungan tersebut adalah bahwa mayoritas rakyat dan politisi pemangku kebijakan di Amerika lebih condong memilih doktrin “Israel-First”. Bahkan seorang calon presiden pun bisa dipastikan tidak akan terpilih bila menganut paham “evenhanded”. Paham Israel-First adalah membela Israel, sedangkan evenhanded adalah bahwa AS harus adil bagi negara di Kawasan Timur Tengah. AS juga mendapatkan simpati dan pengaruh lobi zionis. Karena dipastikan hampir setiap presiden Amerika Serikat selalu membela kepentingan Israel, hal ini dilatar belakangi oleh adanya kekuatan besar dari lobi zionis. Dan melindungi hegemoni Amerika. Setelah runtuhnya Uni Soviet, otomatis tidak ada pesaing dan musuh yang mampu menandingi kekuatan Amerika. Tetapi dalam sebuah politik, seringkali dibutuhkan sebuah musuh dan kawan untuk melindungi kekuasaan. Dalam hal ini Amerika menilai beberapa negara Islam, semisal Palestina dan Iran sebagai musuh politik sedangkan Israel sebagai sahabat politik. Sehingga munculnya musuh bersama (Palestina dan Iran) semakin memperkuat hubungan persahabatan Amerika-Israel.
- b. Negara Israel beruntung dalam hal politik karena dengan adanya Hak Veto AS terhadap Israel maka akan menggagalkan semua rencana resolusi yang merugikan Israel. Kepentingan Israel juga akan terlindungi oleh adanya AS. Serta kemenangan voting atas pembagian wilayah Palestina yang diprakarsai AS menjadi dua bagian, pada tahun 1947. Satu wilayah diperuntukkan bagi bangsa Arab dan wilayah yang lain bagi bangsa Yahudi akan memberikan keuntungan bagi Israel dalam hal “lebih berkuasa” di dalam kawasan negara itu (Rudi Candra, 2018).



Sumber gambar : news.unl.edu

D. Simpulan

PBB yang terbentuk untuk menciptakan perdamaian dunia sebatas draft saja. Anggota lain dewan keamanan akan menciptakan perdamaian bagi Israel dan Palestina. Namun hal ini selalu menjadi draft karena negara Amerika Serikat sebagai great powers menggunakan hak veto untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan perdamaian tersebut. Tujuan dari negara Amerika Serikat adalah untuk menguasai minyak bumi yang ada di wilayah Timur Tengah. Maka dari itu hak veto Amerika Serikat digunakan sebanyak 30 kali untuk Israel dalam membuat kericuhan di tengah Kawasan Timur Tengah salah satunya dengan mendukung perang antara Israel dengan Palestina. Maka dari itu terciptalah hubungan mutualisme antara negara Amerika Serikat dengan Israel dalam dua bentuk keuntungan, yaitu ekonomi dan politik.

Daftar Pustaka

Aulia (2023). *Upaya Perubahan Pengambilan Keputusan Pada Penyelesaian Sengketa Di Badan PBB Sebagai Wujud Optimalisasi PBB Dalam Menjaga Perdamaian Dan Keamanan Dunia*. *Padjadjaran Law Review*, 11(2), 171-182

Link : <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1271/659>

D.W Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika, 1992

Fadillah, dkk (2018). *Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara*. *Journal Of Islamic And Law Studies*, 2(1), 79-91

Link : <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/4568>

Firdaus, A. Y., & Yani, Y. M. (2021). *Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel*. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 104-110.

- Hardianti (2015). *Akibat Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat Terhadap Kasus Agresi Israel Di Gaza*. Garuda, 1-20
- Nurjaman, J. A. (2021). Trump's Peace To Prosperity Plan: Kesepakatan untuk Mewujudkan Perdamaian Israel-Palestina. " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 16.
- Putra, dkk (2023). *Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25031-25040
- Link : <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/10583/8481>
- Riza Sihbudi, 2007, *Menyandera Timur Tengah*, Penerbit Mizan, Jakarta Selatan
- R. Candra (2018). *Pengaruh Identitas Persahabatan Amerika Serikat Dan Israel Terhadap Penolakan Keanggotaan Palestina Di PBB*.
- Shofiah, Q. *Peranan Amerika dalam Proses Perdamaian Israel dan Palestina Tahun 1991-2002*.